

## RELASI KEKUASAAN DAN IDIOLOGI DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA: IMPLEMENTASI KURIKULUM DI SEKOLAH MENENGAH KALIMANTAN TIMUR

Ahmad Fauzi<sup>1</sup>, Purwoko<sup>2</sup>, Muhlis<sup>3</sup>, Warman<sup>4</sup>, Moh. Bahzar<sup>5</sup>, Nurlaili<sup>6</sup>  
Universitas Mulawarman<sup>1</sup>, Universitas Mulawarman<sup>2</sup>, Universitas Mulawarman<sup>3</sup>,  
Universitas Mulawarman<sup>4</sup>, Universitas Mulawarman<sup>5</sup>, Universitas Mulawarman<sup>6</sup>  
Pos-el: achmaedfauzy@gmail.com<sup>1</sup>, pwoko180@gmail.com<sup>2</sup>, muhlis@fkip.unmul.ac.id<sup>3</sup>,  
warman@fkip.unmul.ac.id<sup>4</sup>, m.bahzar130363@gmail.com<sup>5</sup>, nurlaili@fkip.unmul.ac.id<sup>6</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara kekuasaan dan ideologi dalam sistem pendidikan Indonesia melalui implementasi kurikulum di sekolah menengah di Kalimantan Timur. Kajian ini dilandasi oleh pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan ideologi dan reproduksi kekuasaan negara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa sekolah menengah negeri dan swasta di Kalimantan Timur. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen kurikulum serta kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum nasional merefleksikan ideologi dominan negara yang menekankan nilai-nilai nasionalisme, moralitas, dan kepatuhan terhadap otoritas. Namun, dalam praktiknya, implementasi kurikulum di tingkat sekolah dipengaruhi oleh dinamika lokal, kepemimpinan sekolah, dan interpretasi guru terhadap nilai-nilai ideologis yang terkandung di dalamnya. Relasi kekuasaan terlihat dalam pola top-down kebijakan pendidikan, di mana sekolah memiliki ruang terbatas untuk berinovasi sesuai konteks sosial budaya setempat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih berperan sebagai arena hegemonik di mana ideologi negara direproduksi melalui proses pembelajaran, meskipun terdapat upaya resistensi dan adaptasi dari aktor-aktor pendidikan di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Kekuasaan, Ideologi, Sistem Pendidikan, Kurikulum, Kalimantan Timur.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the relationship between power and ideology within Indonesia's education system through the implementation of the curriculum in secondary schools in East Kalimantan. The study is based on the understanding that education functions not only as a medium for knowledge transmission but also as an instrument for ideological formation and the reproduction of state power. The research employs a qualitative approach using a case study method conducted in several public and private secondary schools in East Kalimantan. Data were collected through interviews, observations, and document analysis of curriculum and educational policies. The findings reveal that the national curriculum reflects the dominant state ideology, which emphasizes values of nationalism, morality, and obedience to authority. However, in practice, curriculum implementation at the school level is influenced by local dynamics, school leadership, and teachers' interpretations of the embedded ideological values. The power relations are evident in the top-down nature of educational policies, where schools have limited space for innovation according to their socio-cultural context. This study concludes that the Indonesian education system continues to function as a hegemonic arena where state ideology is reproduced through learning processes, although there are efforts of resistance and adaptation from educational actors at the local level.*

**Keywords:** *Power, Ideology, Education System, Curriculum, East Kalimantan.*

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang dinamis. Pendidikan dan politik berhubungan erat dan saling memengaruhi. Berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Namun demikian, tidak semua pihak mengakui dan mendukung hubungan atau keterkaitan antara politik dan pendidikan. Banyak pihak yang resah dengan realitas tersebut dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisasi atau mengikis elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan. Mereka menginginkan agar pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang terpisah. Mereka percaya bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan dapat dilakukan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa.

Menurut Harman (dalam M. Sirozi, 2010: 25), pandangan bahwa pendidikan dan politik merupakan dua hal yang sama sekali terpisah tidak mengandung kebenaran, baik di negara-negara industri seperti di Amerika dan Australia maupun di negara-negara berkembang. Ia percaya bahwa di belahan dunia manapun, politik dan pendidikan saling terkait dan saling memengaruhi. Keduanya adalah dua aktivitas yang mendasar dalam semua masyarakat manusia.

Pendidikan menyangkut proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan untuk tenaga kerja. Politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh dan otoritas, serta pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumberdaya. Karena keduanya sarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat, maka tidaklah

sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adalah dua aktivitas yang akan terus terkait dan saling berinteraksi. Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan aktivitas-aktivitas pada dua sektor kehidupan masyarakat ini akan saling memengaruhi, apapun karakteristik dan budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Hal ini terjadi dalam setiap masyarakat, apapun tingkat perkembangannya, sistem politiknya dan ideologinya. Untuk dapat memahami berbagai persoalan pendidikan yang ada di tengah masyarakat tidak hanya diperlukan dasar pengalaman dan pengetahuan pendidikan, tetapi juga diperlukan pengetahuan tentang aspek-aspek dan konteks politik dari persoalan-persoalan kependidikan tersebut.

Kekuasaan yang paling nampak dan yang paling mudah dijelaskan adalah dalam aspek kenegaraan. Ini tergambar jelas dari isi Undang-Undang Dasar yang menjadi patokan atau dasar dari setiap keputusan yang dibuat. Agar dapat dipastikan berjalan dengan lancar, peraturan yang dibuat juga memiliki konsekuensi hukuman jika dilanggar. Negara pun memiliki kewenangan untuk menentukan sistem politik yang dianutnya. Indonesia sebagai bangsa yang sedang membangun, memilih sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem politik. Dikatakan demikian karena sebenarnya demokrasi tergantung pula pada peningkatan perkapita suatu negara. Pada gilirannya, perekonomian menjadi teman hidup yang dapat memperkuat demokrasi. Oleh karena itu, menurut Boediono (dalam Rorum Mangunwijaya VII, 2013: 4), dengan kata lain harus ada sinergi yang benar-benar kuat antara politik dan ekonomi. Namun demikian peran pendidikan menjadi sangat penting di sini. Ini karena dalam proses perwujudan demokrasi secara substansial, diperlukan manusia-manusia yang mampu melaksanakan dan

memperkuat institusi-institusi yang bersangkutan. Selain itu, pendidikan juga dirasa harus mampu memberi bekal kompetensi yang mumpuni untuk menjalankan suatu institusi. Sehingga diperlukan pola pendidikan yang baik (Wulandari, dkk., 2018, Indawatik, dkk., 2018). Namun kekuasaan negara pun tidak jarang hanya dijadikan sebagai “atas nama” untuk kepentingan beberapa pihak. Tidak hanya dalam konteks ekonomi, budaya, atau bahkan politik, praktik ini juga terjadi didalam tubuh pendidikan Indonesia. Contoh kecilnya saja, saking seringnya “menyempurnakan” kurikulum hingga muncul istilah *Ganti Menteri Ganti Kurikulum* atau jika dihindak dikatakan dengan bahasa yang lebih halus adalah *Ganti Pemerintahan Ganti Kebijakan*. Pada dasarnya, pendidikan merupakan faktor yang paling mengakar jika berbicara mengenai perkembangan suatu bangsa. Tidak hanya di Indonesia, seantero jagat pun memiliki argumentasi yang serupa jika ditanya mengenai pembangunan bangsanya. Sifatnya yang krusial, membuat pendidikan harus terus bertransformasi menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, tubuh pendidikan harus dibuat sefleksibel mungkin, selentur mungkin, untuk dapat berjalan beriringan dengan perkembangan manusia. Bisa dikatakan masih banyak aspek-aspek yang masih setengah matang dalam pendidikan Indonesia saat ini. Mulai dari aspek tenaga pendiknnya, infrastrukturnya, sarana dan prasaranya, hingga yang sedang masa gojang-ganjing sekarang adalah kurikulumnya. Oleh karena itu menjadi sangat naif jika tidak mengatakan pendidikan Indonesia masih sangat ranum untuk disebut “fix”. Untuk itu, kebijakan demi kebijakan terus digulirkan oleh negara untuk mematangkan sistem pendidikan. Namun entah mengapa, untuk meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah lebih sering

melewati carut marut yang sudah jelas ada didepan mata. Masalah yang paling rawan menurut Illich adalah sekolah menjadi sebuah pasar tenaga kerja yang paling cepat tumbuh (Freire dkk, 2009: 545). Selain itu, perbaikan infrastruktur yang sudah tidak layak, politisasi jabatan kepala sekolah, koherensi dasar keahlian guru dengan mata pelajaran yang diampu, hingga mutasiguru yang dilakukan semena-mena oleh pemerintah daerah juga perlu diperhatikan. Pemerintah lebih senang mengotak-atik kurikulum yang sebenarnya bisa dikatakan bukan masalah yang *urgen* untuk dipecahkan. Pada dasarnya kurikulum menjadi salah satu materi yang tidak dapat dipisahkan jika membahas tentang pendidikan (terutama pendidikan formal). Ini karena kurikulum adalah kerangka yang kemudian ditindaklanjuti oleh proses belajar mengajar. Belum lagi masalah-masalah diatas diselesaikan, pendidikan Indonesia kini diterpa oleh masalah yang baru. Diakhir masa jabatannya Nuh selaku menteri pendidikan merancang sistem kurikulum baru untuk pendidikan Indonesia. Kurikulum tersebut diberi nama Kurikulum 2013. Kemunculan kurikulum ini pun diikuti oleh munculnya pro dan kontra. Bukan hanya secara substansial namun pada saat pelaksanaan. Secara substansial, kurikulum ini dinilai terlalu memberatkan peserta didik karena peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu mereka di sekolah. Hal ini disebabkan oleh makin padatnya jam pelajaran setiap harinya, meskipun beberapa mata pelajaran sudah dihapuskan. Dalam hal waktu, banyak yang menilai waktu yang dibutuhkan sangat singkat. Kurikulum ini dirasa seperti proyek yang kejar tayang karena sang pemilik hendak pensiun. Selain itu banyak pula yang menyebut kurikulum ini sebagai kurikulum instan.

Menanggapi hal ini, seperti yang dilansir dari sindonews.com 16 maret 2013 Nuh berkata bahwa sebenarnya kurikulum ini sudah lama dipikirkan

namun baru bisa direalisasikan. Dengan demikian kurikulum ini tidak bisa dikatakan sebagai kurikulum instan. Nuh juga menganalogikan perubahan kurikulum ini seperti bahtera atau perahu Nabi Nuh. Menurutnya jika kurikulum segeradiganti, maka sistem pendidikan pun segera dapat terselamatkan. Secara substansial, ada yang menganggap kurikulum ini adalah kurikulum yang bias masyarakat kota desa. Ini karena kurikulum 2013 menghilangkan mata pelajaran TIK. Argumentasinya adalah pelajaran TIK dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yang berasal dari desa untuk memahami kecanggihan teknologi. Hal ini tentu berbeda dengan anak-anak yang berada di kota. Dengan fasilitas yang memadai, anak-anak kota bisa saja memahami teknologi tanpa harus bersusah payah mengikuti mata pelajaran TIK. Efek yang ditimbulkan dari bias ini adalah pendidikan semakin mengasingkan salah satu masyarakat karena ia miskin dan ia tidak akan mendapat keuntungan (Illich dkk, 2013: 13).

Masih terkait dengan perampingan mata pelajaran yang dituntut oleh kurikulum 2013, ditakutkan nantinya akan timbul hiruk pikuk lanjutan oleh guru-guru, akan banyak pertanyaan yang muncul mengenai status guru yang mata pelajarannya dibuang. Ada pula kemungkinan guru menyalahi ketentuan professional yang mensyaratkan guru untuk mengajar sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Belum lagi masalah substansial itu selesai dibahas, perhatian masyarakat tertuju pada pelaksanaan kurikulum yang *amburadul*. Mulai dari pendistribusian buku yang lamban hingga makin lamanya waktu anak berada di sekolah. Ada yang menganggap bahwa ini dapat menjadikan anak mudah bosan berada di sekolah dan bosan pula mengikuti proses belajar. Meskipun banyak yang mengkritik penerapannya, ada pula pihak yang setuju dengan penerapan kurikulum ini. Ada

yang menganggap kurikulum 2013 adalah kurikulum yang banyak memperbaiki sistem pendidikan Indonesia dan mampu mempersiapkan generasi yang siap menghadapi kehidupan abad 21. Selain itu kurikulum ini dinilai dapat pula digunakan sebagai media untuk mengejar ketertinggalan masyarakat Indonesia di mata dunia. Sekali tiga uang, kurikulum 2013 juga bisa digunakan sebagai ajang pembentukan karakter dengan cara yang sederhana. Seperti dengan mewajibkan kegiatan pramuka di tiap-tiap sekolah. Setelah secara marathon menerapkan kurikulum yang dinamai sebagai kurikulum instan, Anis Baswedan selaku menteri pendidikan saat ini mengeluarkan peraturan baru melalui Permendiknas No 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Peraturan ini dikeluarkan karena penerapan kurikulum 2013 yang sangat instan dan masih memerlukan uji coba lanjutan. Lebih rinci, dilansir dari CCN Indonesia (2014) (<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141218055425-20-18957/menteri-anies-keluarkan-peraturan-kurikulum-2013/>), pada pasal dua menyebutkan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama tiga semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. Pro dan kontra yang dilakukan oleh masyarakat diutarakan dalam sebuah media, baik dalam media cetak maupun dalam media elektronik seperti televisi. Kehadiran media memiliki poin positif juga negatif dalam kehidupan manusia. Dampak negatifnya, media dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang tertentu untuk mendongkrak popularitas atau tujuan lain. Seperti yang sering dilakukan oleh artis atau bahkan politisi. Media ini dijadikan sebagai arena untuk membangun citra. Sebagai contoh politisi dapat melakukan kampanye dan seolah-olah menunjukkan bahwa ia dan partainya adalah pro rakyat miskin.

Meskipun demikian, media juga memiliki poin positif. Salah satunya adalah media dapat digunakan sebagai arena diskusi (baik secara intelektual maupun melalui celetukan-celetukan, secara lisan atau tulisan). Seperti pada rubrik opini dalam surat kabar hingga dialog interaktif yang dilakukan oleh beberapa stasiun televisi swasta. Opini-opini yang dicantumkan atau yang dilontarkan dianggap sebagai perwakilan dari suara masyarakat secara luas.

Dari pemaparan latar belakang diatas, sangat terlihat kekuasaan sebenarnya bersifat luas dan tidak hanya terbatas dalam tatanan pemerintahan atau antara relasi pemilik modal dan pekerja. Ada cara lain yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan ideologi. Oleh karena itu rumusan masalah yang hendak dicapai adalah “Bagaimana polemik perubahan kurikulum yang terjadi dalam media sosial?”. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran rekonstruksi polemik perubahan kurikulum 2013.

Secara khusus akan membahas mengenai: 1) Pro-kontra yang terjadi dalam media massa, Aktor yang memproduksi wacana; 2) Ideologi yang digunakan dari setiap wacana yang dikeluarkan; 3) Memetakan pihak mana yang menjadi kelompok pro, kontra, atau malah ada pihak yang seolah-oleh menjadi mediator. Seperti yang telah dijelaskan diatas, memang ketika berbicara mengenai kekuasaan dirasa sangat sempit jika hanya melihatnya dari relasi pemilik modal dan pekerja, tuan tanah dan buruh tani, pemilik alat produksi dan buruh. Ini karena kekuasaan bersifat abstrak. Maksudnya adalah ketika suatu ideologi dipegang teguh dan pengetahuan yang dimiliki lebih dari pada yang lain, dirasa kekuasaan akan tetap muncul. Meskipun dalam kelompok yang sangat kecil sekalipun. Lebih fokus lagi, relasi kuasa yang berbeda juga

diutaran oleh Michael Apple. Konsep utama dari Michael

W. Apple adalah mengenai kekuasaan dan ketidakadilan yang tercermin dalam kurikulum. Kurikulum merupakan arena pertarungan ideologi dalam konteks pendidikan. Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, pengetahuan yang diajarkan dalam pendidikan menunjukkan bagaimana kelas dominan memelihara dan melegitimasi kekuasaan dari perankurikulum (Arif, 2014: 37). Sebagai contoh, mengkategorikan sekolah favorit dan yang tidak favorit, kemudian memberikan akses yang berbeda untuk dapat masuk hingga lulus dari sekolah yang tergolong favorit.

Menurut Apple, sekolah tidak menunjukkan kekuasaan yang progresif tapi malah menggunakan sistem ekonomi dan budaya (Hidayat, 2013: 123). Dalam hal ini ideologi pihak dominan benar-benar dipertahanan. Pihak dominan menggunakan budaya populer untuk menunjukkan identitas kelasnya. Sehingga seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pendidikan adalah sarana pelanggeng *status quo* bagi kelas dominan. Dalam bahasa Gramsci, ideologi-ideologi itu masuk melalui suatu sistem yang disebut sebagai hegemoni. Ini muncul karena ada ruang material dan saluran pendapatan. Maksudnya adalah pemilik modal untuk mempengaruhi buruh agar tetap mau bekerja dengannya, contohnya saja dengan perkataan yang dilakukan berulang-ulang. Pandangan mengenai hegemoni ini sebenarnya merupakan jawaban dari pertanyaan Marx tentang mengapa revolusi tidak segera terjadi pada masyarakat saat itu (Hidayat, 2013: 127). Selain itu sekolah sebagai satu lembaga pendidikan kadang-kadang malah menciptakan persaingan dan ketegangan antara fungsi ideologis ekomoni karena sekolah tidak hanya merespon kebutuhan modal, tetapi juga harus menjaga legitimasi untuk kelompok lain (Hidayat, 2013: 130). Tidak hanya

itu, beberapa sekolah pun dinilai surplus menciptakan tenaga kerja. Pendidikan juga dirasa semakin kuat diletakkan dalam sebuah dikotomi. Di satu sisi pihak dominan merasa bahwa pendidikan dan kebijakan-kebijakannya sudah melakukan internalisasi nilai individual yang baik. Ini dapat dilihat adanya nilai kompetisi yang kuat yang selalu ditanamkan dalam ranah pendidikan. Dalam konteks pendidikan Indonesia munculnya rangking hingga standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran menjadikan anak untuk terbiasa bekerja keras.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Analisis Isi (*Content Analysis*) merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi – inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun nonverbal. Sejauh ini, makna komunikasi menjadi amat dominan dalam setiap peristiwa komunikasi.

Sebenarnya analisis isi komunikasi amat tua umurnya, setua umur manusia. Namun, penggunaan teknik ini diintroduksikan di bawah nama analisis isi (*content analysis*) dalam metode penelitian tidak setua umur penggunaan istilah tersebut. Tuanya umur penggunaan analisis isi dalam praktik kehidupan manusia terjadi karena sejak ada manusia di dunia, manusia saling menganalisis makna komunikasi yang dilakukan antara satu dengan lainnya. Gagasan untuk menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian justru muncul dari orang seperti Bernard Berelson (1959). Ia telah menaruh banyak perhatian pada analisis isi. Tekanan Berelson adalah menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian yang objektif,

sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari apa yang tampak dalam komunikasi. Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan dari semiotik, analisis wacana, dan framing. Ketiga analisis tersebut adalah terletak pada titik fokus yang hendak dikaji. Oleh karena itu peneliti memilih menggunakan analisis isi untuk mengkaji tentang komunikasi yang terjadi dalam suatu fenomena yang dikembangkan oleh media. Dari analisis isi ini nantinya akan dapat terlihat pokok perdebatan yang terjadi dari masing-masing rezim. Teknik analisis isi (*content analysis*), menurut Holsti (dalam Permatasari, 2008: 89) analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khususnya suatu pesan secara objektif dan sistematis. Teknik analisis ini sangat erat hubungannya dengan komunikasi dan analisis komunikasi. Langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan untuk menggunakan teknik analisis isi kualitatif adalah pertama, peneliti harus dapat merumuskan dengan tepat apa yang ingin dicapai. Kedua, memilih unit analisis yang akan diuji. Jika penelitian berhubungan dengan data pesan dalam media, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap pesan dan media yang mengantar pesan. Sumber penelitian yang disasar adalah Harian Kompas sejak Oktober 2012 hingga Februari 2015. Subjek ini dipilih karena Kompas dinilai sebagai surat kabar yang memiliki perhatian khusus terhadap pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi Kompas mengikuti perkembangan wacana pendidikan yang terjadi. Pembahasan ini dapat dilihat dari rubrik opini dan *education news* yang telah disediakan. Berita yang diambil pun tentunya tidak setiap hari dalam kurun dua tahun tersebut. Melainkan hanya pada tanggal-tanggal yang menyertakan tulisan mengenai perubahan Kurikulum 2013 saja. Mengingat wacana dibentuk

tidak hanya melalui satu media, maka pembekoran wacana yang dilakukan pun dibantu dengan media massa yang lain, seperti CNN, Metrotvnews. Com, Liputan6. Com, dan masih banyak lagi yang lain. Ini dilakukan dengan cara membelah subjek-subjek yang memproduksi wacana berdasarkan diskursusnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pendidikan dan kebijakan Politik

Era reformasi memberi ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara.

Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan.

Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model "Manajemen Berbasis Sekolah". Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem "Kurikulum Berbasis Kompetensi".

Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989, dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai, "Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara." (Standar Nasional Pendidikan, 2005: 102).

Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan, terutama dalam dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9 tahun, dan peningkatan standar penghasilan Guru dengan adanya sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk peningkatan kompetensi guru, dan sebagainya.

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 2 ayat (1) Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Pasal (4) Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajar-an, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

## B. Relasi Politik Kekuasaan dan Pendidikan

Hubungan antara politik dan pendidikan terwujud ke dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai karakteristik *setting* sosial politik dimana hubungan itu terjadi. Bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam suatu masyarakat, hubungan tersebut bisa saja sangat kuat dan riil dan dalam masyarakat lainnya hubungan tersebut bisa saja lemah dan tidak nyata. Pola hubungan antara pendidikan dan politik di negara-negara berkembang berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang lebih primitif yang berdasarkan pada basis kesukuan (*Tribal-based societies*) misalnya, lazim bagi orang tua dari satu suku memainkan dua peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai pendidik. Mereka membuat keputusan-keputusan penting dan memastikan bahwa keputusan-keputusan ini diimplementasikan dan diterapkan.

Mereka juga mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan dewasa dengan mengajarkan mereka teknik-teknik berburu dan mencari ikan, metode-metode berperang dan sebagainya. Selain itu, mereka juga menanamkan pada generasi muda mereka kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi serta mempersiapkan mereka untuk berperan secara politis.

Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, serta mengadopsi nilai-nilai dan lembaga-lembaga Barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional kepada pola modern. Di banyak negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat, pola hubungan pendidikan dan politik umumnya sama dengan hubungan pendidikan dan politik di negara-negara Barat. Ada satu perbedaan bahwa di negara-negara berkembang yang lebih maju, pendidikan formal memainkan

peran yang sangat penting dan nyata dalam mencapai perubahan politik, dan dalam proses rekrutmen dan pelatihan pemimpin dan elite politik baru. Di sebagian negara maju, pendidikan berada dalam arus utama kehidupan politik nasional dan menjadi isu penting dalam wacana politik. Di negara-negara lain, persoalan kebijakan pendidikan kurang mendapat perhatian dan bukan merupakan topik yang hangat sebagai wacana publik.

Dalam masyarakat modern pada umumnya, pendidikan adalah komoditi politik yang sangat penting. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah politik yang banyak, serta memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak pada sistem politik, stabilitas dan praktik sehari-harinya. Dalam masyarakat modern pendidikan merupakan wilayah tanggung jawab pemerintah yang besar. Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol oleh pemerintah dan memengaruhi kredibilitas pemerintah. Karena besarnya nuansa politik dari kebijakan-kebijakan pendidikan, maka berbagai faktor politis yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan turut memengaruhi bagaimana kontrol terhadap pendidikan dan bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan dibuat. Sebagai wilayah tanggung jawab pemerintah, pendidikan sering “dipaksa” menyesuaikan diri dengan pola-pola administratif umum dan norma-norma yang berlaku. Akibatnya, pendidikan publik dibiayai dan dikontrol oleh pemerintah sama halnya pemerintah membiayai dan mengontrol bidang-bidang lainnya, seperti pertanian, kesehatan, atau pelayanan sosial.

Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikan dan politik serta aspek-aspek publik lainnya, setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya. Masing-masing pemerintah menempat-

kan prioritas pendidikan yang berbeda-beda, dan menyukai kebijakan-kebijakan yang merefleksikan pandangan dasar dan kepentingan-kepentingan mereka. Dari waktu ke waktu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pendidikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik.

Keputusan-keputusan tentang pendidikan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan yang dihadapi oleh pemerintah. Sekolah-sekolah, universitas-universitas dan lembaga pendidikan negeri merupakan sektor publik yang paling terpengaruh oleh penerapan sistem politik. Ini tidak berarti bahwa lembaga-lembaga pendidikan non pemerintah tidak terpengaruh oleh keputusan-keputusan dan kontrol pemerintah. Karena pada umumnya sekolah-sekolah non pemerintah sangat tergantung pada subsidi negara, maka untuk mendapatkan subsidi pemerintah, sekolah-sekolah non pemerintah tersebut seringkali diharuskan oleh pemegang otoritas pendidikan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti menyesuaikan struktur organisasi sekolah, merombak kurikulum, kriteria pengangkatan guru, prosedur pengelolaan dana, format akreditasi, tidak memasukkan bidang studi tertentu, tidak menggunakan buku pelajaran tertentu, menggunakan seragam tertentu, melaksanakan upacara-upacara tertentu dan sebagainya.

Sekolah-sekolah non pemerintah yang sangat tergantung pada izin dan subsidi pemerintah tidak punya banyak pilihan selain mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun dengan begitu tidak sedikit dari sekolah-sekolah tersebut harus “kehilangan identitas” atau terpaksa “lari” dari visi, misi, dan tujuan awal pendiriannya. Di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, sangat sedikit sekolah non pemerintah yang dapat meloloskan diri dari “jerat” politik pendidikan penguasa. Di Indonesia, Pondok Modern Gontor

yang tidak mau mengikuti berbagai persyaratan yang dituntut oleh otoritas pendidikan di negeri ini. Hasilnya sangat jelas; sementara banyak sekolah-sekolah dan pondok pesantren non pemerintah “kehilangan identitas” dan terjebak ke dalam uniformitas pendidikan yang diterapkan oleh otoritas pendidikan di tanah air. Selain itu, Pondok Modern Gontor adalah salah satu dari sedikit institusi pendidikan di tanah air yang mendapat pengakuan internasional. Banyak lulusan Pondok Modern Gontor yang diterima di Al-Azhar, Mesir, dengan kewajiban mengikuti program matrikulasi yang sangat minim.

Jika politik dipahami sebagai “praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat, serta pembuatan keputusan-keputusan otoritas tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial” (Harman, 1974: 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Semua lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun non pemerintah, dalam batas-batas tertentu tidak terlepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas. Dengan kata lain, politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan menurut Baldrige (1971), lembaga-lembaga pendidikan dipandang sebagai sistem-sistem politik-mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik. Tentu saja aktivitas politik di sebuah sekolah dasar yang kecil dalam banyak hal kurang penting dibandingkan dengan sistem politik di Kementerian Pendidikan. Namun, pada hakikatnya aktivitas politik pada dua lembaga pendidikan tersebut sama saja jenisnya. Sebuah keputusan yang dibuat dalam rapat guru-guru sekolah untuk mengimplementasikan sebuah program pengajaran baru sama politisnya dengan sebuah keputusan yang dibuat oleh

Kementrian Pendidikan dalam rangka mengalokasikan sejumlah dana bantuan untuk sekolah-sekolah tertentu.

Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling memengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya, setiap aktifitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Pendidikan pada masa reformasi tidak saja berkaitan dengan kekuasaan politik di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal.

### **C. Akselerasi Kebijakan Pendidikan Kalimantan Timur**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-4 terdapat 3 tujuan pemerintah Negara RI, yakni 3 tujuan internal: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Satu tujuan eksternal yakni: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada tujuan internal yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan. Apakah instrumen ini telah berfungsi secara optimal dapat menjadi bahan diskusi yang sangat panjang. Untuk menjadi bangsa maju, untuk menjadi daerah maju, boleh terpesona dulu dengan negara dan daerah lain yang lebih dahulu maju; dan secara pasti itu dicapai lewat instrumen pemerintah berupa pendidikan. Dapat dipastikan, di negara mana pun yang maju, untuk melompat dan melampaui kemajuan negara lain, pasti di situ terjadi percepatan memajukan pendidikan melebihi negara-negara lain. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Kalimantan Timur? Untuk Indonesia,

serahkan kepada yang lebih berkompeten untuk membahas dan mengkajinya. Untuk Kalimantan Timur mari kita mulai dengan pertanyaan: apakah sudah terjadi akselerasi pendidikan? Apakah akselerasi itu diarahkan menuju Indonesia Maju 2045? Sepanjang pengetahuan penulis, usaha memajukan pendidikan di Kalimantan Timur telah dilakukan dengan baik. Minimal mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh Pusat. Baru pada tahun 2009, dimulai terobosan untuk melakukan percepatan dan ikhtiar untuk “melompat” dengan menerbitkan sejumlah kebijakan. Kebijakan tersebut, antara lain: merealisasikan APBD 20% untuk pendidikan; Wajib Belajar 12 Tahun; pemberian beasiswa Kalimantan Timur Cemerlang (Cerdas, Merata, prestasi Gemilang) yang sekarang dilanjutkan dengan Kalimantan Timur Tuntas; mendirikan dua perguruan tinggi negeri; mendirikan Sekolah Khusus Olah Raga bertaraf Internasional (SKOI); mendirikan Education Center sebagai pusat penelitian, diklat, dan pengembangan keilmuan untuk siswa-siswi dari SD-SLTA dan mahasiswa seKalimantan Timur; dan, pengiriman putra/putri terbaik Kalimantan Timur untuk belajar Ilmu Perkeretaapian di Rusia. Adanya pergantian kepemimpinan terbuka peluang improvisasi kebijakan, dan ini wajar sesuai dengan pertumbuhan masalah dengan dinamikanya. Hal yang perlu dipertahankan adalah konsistensi menuju Kalimantan Timur Maju dalam rangka Indonesia Maju 2045. Konsistensi dimaksudkan di sini adalah dalam kebijakan yang menjadi domain pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur di provinsi dan Bupati/Walikota di tingkat kabupaten dan kota. Simpul-simpul yang perlu dikuatkan di sektor pendidikan untuk terjadi percepatan ialah: guru, fasilitas, akses, kurikulum, relevansi, dan tata kelola. Jika mau belajar dari kemajuan pendidikan di Finlandia, sebagai negara termaju pendidikannya, maka dua simpul utama

yakni: guru yang berkualitas dan fasilitas sekolah yang lengkap itu merupakan pengungkit kemajuan. Pada Gambar 1 di atas dan penjelasannya dapat menjadi pemahaman pimpinan pendidikan di Kalimantan Timur, yakni apa yang telah dicapai dan gap yang harus diisinya sehingga pada 2045 Kalimantan Timur telah memiliki capaian sebagaimana harapan nasional. Crucial point bagi pelaku kebijakan di daerah adalah perlu dimilikinya Peta Jalan Pendidikan atau Garis-Garis Besar Haluan Pendidikan Kalimantan Timur. Darinya, step by step, cepat dan pasti Kalimantan Timur dapat melaju sepenuh arah. Dari situ pula Kalimantan Timur bisa berbuat lebih dari yang seharusnya

#### 4. SIMPULAN

Pendidikan merupakan instrumen untuk memajukan dan meningkatkan kualitas SDM. Kualitas SDM merupakan modal utama untuk memajukan negara. Bentuk kebijakan pendidikan dan implementasinya untuk memajukan bangsa dan negara merupakan cerminan political will pemerintah. Untuk daerah adalah political will pemerintah daerah. Milestone 2045 merupakan ukuran di saat itu seberapa berhasil kinerja pendidikan baik secara nasional maupun lokal-daerah. Untuk hari ini, 23 tahun sebelum sampai ke 2045, masih ada waktu untuk berbuat "lebih" sehingga ukuran-ukuran keberhasilan Indonesia Maju patut disematkan pada waktunya, termasuk kepada kepala-kepala daerah. Untuk Kalimantan Timur, perlu akselerasi menuju Indonesia Maju 2045. Apa yang telah dan sedang dilakukan nasional dikurang dengan apa yang telah dan sedang dilakukan di Kalimantan Timur, itulah tantangannya. Sebagai misal, jika nasional telah melakukan 10 hal dan Kalimantan Timur baru 5 yang dilakukan, maka  $10-5 = 5$  (gap). Gap ini perlu diisi dengan kebijakan percepatan, dengan tools akselerasi, dan SDM pendukungnya. Tiga aktor utama di

daerah untuk mendukung keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur Menuju Indonesia Maju 2045 ialah: Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), Lembaga-lembaga Pendidikan (Paud/Dikdas/Dikmen/Dikti), dan Masyarakat. Kolaborasi, sinergi, dan konsistensi dalam regulasi dan implementasi akan memungkinkan terjadinya akselerasi.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Mukhrizal, dkk. 2014. *Pendidikan Posmodernisme: Telaah Kritis Pemikiran Tokoh Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Barker, Chris. 2011. *Cultural Studies: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Budiono, dkk. 2013. *Forum Mangunwijaya VII: Menyambut Kurikulum 2013*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fakih, Mansur, Rom Topatimasang, dkk. 2001. *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo, Ivan Illich, Erich Fromm, dkk. 2009. *Menggugat Pendidikan: Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis* (terj). Harry Wahyu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo. 2008. *Pendidikan Kaum Tertindas* (terj). Imam Ahmad. Jakarta: LP3ES.
- Hidayat, Rakhmat. 2013. *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Illich, Ivan, dkk. 2013. *Sekolah Dibubarkan, Lantas Mau Apa?: Pro dan Kontra Terhadap Pandangan Ivan Illich* (terj). Ign Gatut Saksono. Yogyakarta: Ampera Utama.
- Indawatik, R., Kartono, D. T., & Utami, T. (2018). Eksklusifitas Siswa

(Studi Fenomenologi Konstruksi Sosial Pola Eksklusifitas Siswa pada Kelas Unggulan di SMA Muhammadiyah 1 Sragen Tahun Ajaran 2011/2012). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1).

- Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault: Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mills, Sara. 2007. *Diskursus: Sebuah Piranti Analisis dalam Kajian Ilmu Sosial* (terj). Ali Noer Zaman. Jakarta: Penerbit Qalam.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, “Statistik Sekolah Menengah Atas (SMA) 2015/2016”, Setjen Kemdikbud, Jakarta, 2016
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tilaar, H.A.R, Riant Nugroho. 2012. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.